

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN TREND
PROVINSI SUMATERA SELATAN****Intan Sania¹***saniaintan861@gmail.com***Annisa Salsabila²***chaannisalsabila@gmail.com***Sulistia³***sulistiasulis20908@gmail.com***Agung Rizki Putra⁴***agungrizkiputra@gmail.com***Universitas Bangka Belitung****ABSTRACT**

This research aims to determine the financial capacity of the Regional Government of South Sumatra Province for the 2017-2023 Fiscal Year as seen from the ratio of effectiveness, efficiency, Routine Capability Index (IKR), and trend analysis. This research is quantitative descriptive. The data collected in this study was obtained through documentation methods which were then analyzed through descriptive analysis. This research indicates that in South Sumatra Province, the PAD effectiveness ratio is included in the quite effective category, the efficiency ratio is included in the very efficient category, the routine capability index ratio is included in the very poor category, and the effectiveness trend shows a negative direction of development as well as The trend of the Routine Capability Index (IKR) shows a negative direction of development. Meanwhile, the efficiency trend shows a positive direction of development.

Keywords: *trend analysis, routine capability index, effectiveness and efficiency*

1. PENDAHULUAN**1.1. Latar Belakang**

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang merupakan titik awal otonomi daerah (Damanhuri, 2013). Berdasarkan Perundang-undangan tersebut, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk mengelola potensi lokal mereka dan meningkatkan kemandirian keuangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian daerah. Dasar perimbangan di balik penerapan otonomi daerah yaitu karena adanya dorongan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah yang berlandaskan kesejahteraan Masyarakat di daerah tersebut (Puspita, 2016).

Otonomi daerah merupakan kekuasaan atau kebebasan pemerintah daerah untuk secara mandiri mengelola kekuasaan pemerintahan dan melindungi masyarakat lokal dalam rangka percepatan pembangunan nasional (Agustina & Ahmad, 2021). Keberhasilan otonomi daerah tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Daerah otonom harus mempunyai kewenangan dan kapasitas maksimal untuk menghimpun sumber keuangannya sendiri. Aspek keuangan merupakan salah satu indikator dasar untuk memahami secara konkrit seberapa baik suatu daerah mampu mengelola keuangannya sendiri (Christian et al., 2023). Salah satu unsur penting dalam terselenggaranya otonomi daerah dan desentralisasi secara cermat adalah pengaturan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mencapai otonomi daerah dan desentralisasi yang lebih luas, jelas dan bertanggung jawab, diperlukan suatu pengelolaan keuangan daerah yang dapat memantau dan mengatur kebijakan keuangan daerah secara ekonomi, efisien, efektif dan terbuka (Oesi Agustina, 2013).

Analisis kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bertujuan untuk menghubungkan tren sasaran yang terjadi dengan cara membagi hasil pendapatan awal daerah antara periode berjalan dan periode yang akan dibandingkan. Evaluasi kinerja keuangan melalui analisis rasio keuangan realisasi APBD mempunyai arti penting dalam menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Analisis rasio pendapatan awal daerah pada sektor swasta sudah menjadi hal yang lumrah dan sering digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan. Sementara itu, pendapatan asli daerah pada sektor publik belum banyak dijadikan subjek analisis rasio keuangan. menjadi relevan dengan relevansi bidang yang mendorong peningkatan kinerja hasil lokal. Analisis rasio keuangan dengan demikian menjadi pedoman penting untuk terus meningkatkan dan memperkuat kinerja pemerintah daerah.

1.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan pada penelitian ini berkaitan dengan menganalisis kemampuan keuangan daerah dan trend Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017-2023.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan keuangan daerah serta melihat trend Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017-2023.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Menjelaskan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan suatu wilayah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi wilayah yang sebenarnya. Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen (Tumija & Sinta, 2022)

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Tabel 1. Kriteria Rasio Efektivitas PAD

%	Keterangan
Lebih dari 100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90 sampai dengan 99%	Cukup efektif
75 sampai dengan 89%	Kurang efektif
Kurang dari 75%	Tidak efektif

2.2. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efisiensi merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menyalurkan PAD yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya. Semakin rendah rasio efisiensi, semakin baik kinerja pemerintah daerah. (Maulia, 2022)

$$\frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Tabel 2. Kriteria Rasio Efisiensi PAD

%	Keterangan
Kurang dari 100%	Sangat efisien
10 sampai 20%	Efisien
21 sampai dengan 30%	Cukup efisien
31 sampai dengan 40%	Kurang efisien
Lebih dari 40%	Tidak efisien

2.3. Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Indeks Kemampuan Rutin (IKR) adalah suatu ukuran yang mencerminkan seberapa efisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan pengeluaran rutinnya. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan persentase PAD yang digunakan untuk menutup biaya rutin daerah tersebut. Selain berperan sebagai penilaian keuangan daerah, IKR juga berfungsi sebagai standar untuk mengevaluasi stabilitas keuangan daerah, memberikan tingkat kemampuan finansial yang berkisar dari rendah hingga sangat baik. Dalam kerangka alokasi dan pengelolaan sumber daya keuangan daerah, IKR menjadi instrumen penting untuk membimbing pengambilan keputusan yang akurat. Semakin tinggi nilai pada Indeks Kemampuan Rutin, semakin besar pula kemampuan keuangan daerah dalam konteks otonomi daerah (Panggabean, 2017).

$$\frac{PAD}{TotalPengeluaranRutin}$$

Tabel 3. Kriteria Rasio Indeks Kemampuan Rutin

%	Keterangan
80,01 - 100%	Sangat baik
60,01 – 80,00%	Baik
40,01 – 60,00%	Cukup
20,01 – 40,00%	Kurang
00,00 – 20,00%	Sangat kurang

2.4. Analisis Trend

Analisis trend bertujuan untuk mengestimasi potensi efektivitas, efisiensi, dan kemampuan rutin Provinsi Sumatera Selatan di masa yang akan datang. Dengan melakukan proyeksi, baik individu maupun lembaga dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik untuk perencanaan kegiatan dan pengaturan anggaran keuangan pada periode mendatang. Dengan memanfaatkan data historis yang telah terkumpul dan diolah, proyeksi dilakukan sebagai upaya untuk meramalkan kondisi yang mungkin terjadi di masa depan (Tamboto et al., 2014).

$$Y' = a + b X$$

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dan trend Provinsi Sumatera Selatan. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder, yang diperoleh dari data laporan keuangan daerah Sumatera Selatan yakni pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rentang waktu 5 tahun, mulai dari 2017 hingga 2023.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4. Hasil Uji Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Presentase %	Keterangan
2017	60,52	Tidak Efektif
2018	91,01	Cukup Efektif
2019	96,51	Cukup Efektif
2020	77,81	Kurang Efektif
2021	85,10	Kurang Efektif
2022	89,61	Cukup Efektif
2023	64,67	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan data pada tabel 4 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata rasio efektivitas di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2017-2023 dapat dianggap sebagai tingkat efektivitas yang memadai. Rasio efektivitas ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan pendapatan asli daerah sesuai dengan rencana, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berhasil secara memadai dalam mengkonkretkan pendapatan daerah yang telah direncanakan, sejalan dengan anggaran yang telah ditargetkan berdasarkan potensi riil daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini sejalan dengan konsep teori uang yang diteliti oleh Pratama Ahmad (2016), di mana efektivitas diartikan sebagai sejauh mana kinerja sesungguhnya dapat dibandingkan dengan tingkat pencapaian yang diharapkan.

4.2. Analisis Model Struktural

Tabel 5. Hasil Uji Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Presentase %	Keterangan
2017	0,92%	Sangat Efisien
2018	5,65%	Sangat Efisien
2019	6,33%	Sangat Efisien
2020	6,26%	Sangat Efisien
2021	5,64%	Sangat Efisien
2022	4,71%	Sangat Efisien
2023	4,66%	Sangat Efisien

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan data pada tabel 5 diatas maka dapat di interpretasikan bahwa, rata-rata rasio efisiensi pendapatan asli daerah dari tahun 2017-2023 di Provinsi Sumatera Selatan Sangat Efisien. Hasil ini serupa dengan studi yang dilakukan oleh (Oesi Agustina, 2013), di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio efisiensi diklasifikasikan sangat efisien. Ini mengindikasikan bahwasanya Kompetensi finansial daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terlihat sangat baik. Meskipun biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah relatif kecil, hasil yang dicapai optimal.

4.3. Rasio Indeks Kemampuan Rutin

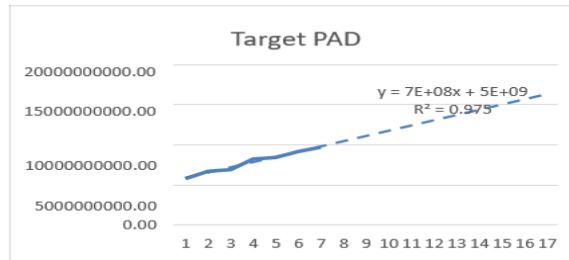
Tabel 6. Hasil Uji Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Tahun	Presentase %	Keterangan
2017	2,37%	Sangat kurang
2018	0,08%	Sangat kurang
2019	0,01%	Sangat kurang
2020	0,01%	Sangat kurang
2021	0,01%	Sangat kurang
2022	0,01%	Sangat kurang
2023	0,02%	Sangat kurang

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 6 dapat dilihat bahwa, kemampuan keuangan daerah yang digambarkan dari rasio indeks kemampuan rutin Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2023 terklasifikasi sangat kurang. Ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki keterbatasan yang sangat signifikan dalam menutupi pengeluaran rutin yang dibutuhkan. Dikarenakan PAD Provinsi Sumatera Selatan sangat kecil dan sampai sekarang sumber keuangan masih bergantung pada Pemerintah Pusat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bulo, 2019) menunjukkan bahwa PAD mempunyai kemampuan yang masih sangat kurang dalam membiayai pengeluaran rutin dari tahun 2014-2017 untuk pemerintah daerah Kota Bontang.

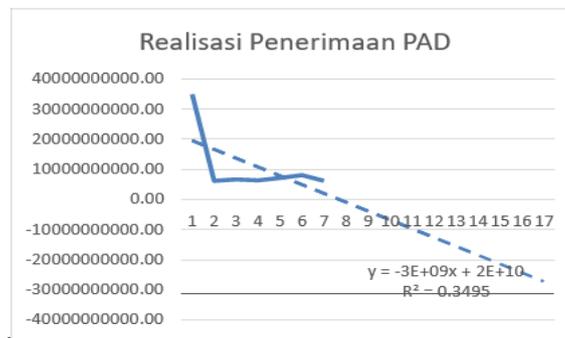
4.4. Analisis Trend



Sumber: Data diolah, 2024

Gambar 1. Analisis Trend Target PAD

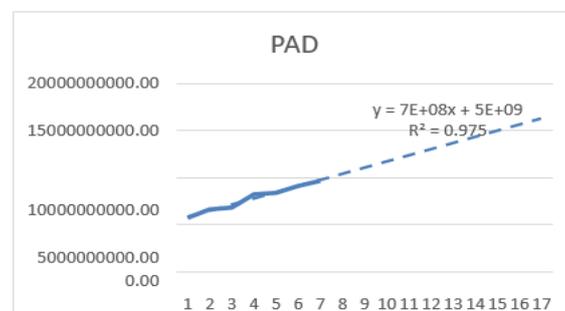
Gambar di atas menunjukkan realisasi penerimaan PAD yang bervariasi dan cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari hasil analisis trend dengan persamaan $y = -3E+09x + 2E+10$. Persamaan trennya searah dengan kemiringan negatif yang sama dengan return PAD setiap tahunnya. Jika kita mengamati garis tren koefisien determinasi realisasi PAD di Provinsi Sumatera Selatan, nilai $R^2 = 0,3495\%$. Hal ini menunjukkan bahwa akurasi model trendline mempunyai tingkat kepercayaan sebesar 34,95%. Rata-rata masa depan adalah 34,59 % per tahunnya.



Sumber: Data diolah, 2024

Gambar 2. Analisis Trend Realisasi Penerimaan PAD

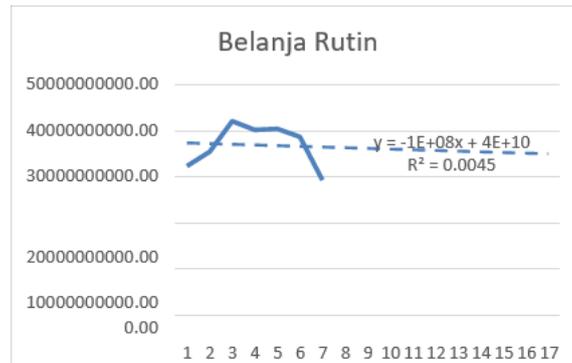
Gambar di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD bervariasi dan naik turun setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari hasil analisis trend persamaan $y = -3E+09x + 2E+10$. Persamaan tren mempunyai arah kemiringan negatif yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD semakin menurun setiap tahunnya. Jika dilihat garis tren koefisien determinasi perolehan pendapatan PAD Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan nilai $R^2 = 0,3495\%$. Hal ini menunjukkan bahwa akurasi model trendline mempunyai tingkat kepercayaan sebesar 34,95%. Rata-rata perkembangan realisasi pendapatan PAD Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya akan meningkat sebesar 34,59% selama 5 tahun ke depan.



Sumber: Data diolah, 2024

Gambar 3. Analisis Trend PAD

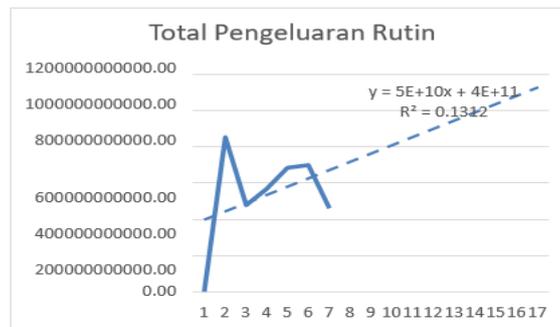
Gambar diatas menunjukkan PAD di Provinsi Sumatera Selatan dengan hasil yang terus meningkat setiap tahunnya. Hasil analisis tren PAD Provinsi Sumatera Selatan persamaan $y = 7E+08x+5E+09$. Persamaan tren mempunyai kemiringan positif, artinya PAD meningkat setiap tahunnya. Garis tren koefisien determinasi PAD Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan nilai $R^2 = 0,975$. Bahwa keakuratan model garis cenderung pada tingkat kepercayaan 9,75%. Rata-rata perkembangan PAD di Provinsi Sumatera Selatan dalam 5 tahun ke depan hanya meningkat sebesar 9,75% setiap tahunnya.



Sumber: Data diolah, 2024

Gambar 4. Analisis Trend Belanja Rutin

Gambar di atas menunjukkan data Belanja rutin di provinsi Sumatera Selatan. Pada gambar terlihat pembelanjaan biasa pada tahun 2017-2028 mengalami fluktuasi. Dilihat dari analisis hasil tren pembelian rutin di provinsi Sumatera Selatan diperoleh persamaan $y = -1E+08x+4E+10$. Persamaan ini memiliki kemiringan negatif, artinya belanja rutin menurun setiap tahunnya. Garis tren koefisien determinasi belanja rutin di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan nilai $R^2 = 0,0045$. Akurasi model garis tren memiliki tingkat kepercayaan sebesar 0,45%. Rata-rata perkembangan belanja rutin di Provinsi Sumatera Selatan selama lima tahun ke depan hanya meningkat sebesar 0,45% setiap tahunnya.



Sumber: Data diolah, 2024

Gambar 5. Analisis Trend Total Pengeluaran Rutin

Gambar di atas menunjukkan total pengeluaran rutin di Provinsi Sumatera Selatan. Dari gambar terlihat hasilnya bervariasi atau fluktuatif. Hasil analisis tren menunjukkan persamaan $y = 5E+10x+4E+11$. Tren persamaan yang ditampilkan adalah positif yang menunjukkan bahwa total pendapatan rutin semakin meningkat setiap tahunnya. Garis statistik penentuan total belanja rutin di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan $R^2 = 0,1312$. Hal ini menunjukkan bahwa akurasi model garis tren mempunyai tingkat kepercayaan sebesar 13,12%. Perkembangan total upah terhadap total belanja rutin di Provinsi Sumatera Selatan hanya akan meningkat sebesar 13,12% setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun. Berdasarkan analisis tren tahun 2017-2028, tren pembangunan Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan penurunan. Analisis penurunan tingkat produktivitas PAD Provinsi

Sumatera Selatan antara tahun 2017 hingga tahun 2028 menunjukkan perkembangan yang positif. Perang positif ini perlu diakhiri agar keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat berjalan mandiri dalam memberhentikan pemerintahannya tanpa memerlukan bantuan pemerintah pusat dan berhasil mencapai pendapatan negara yang tercatat. Selain PAD provinsi Sumatera Selatan mampu menutupi biaya rutin yang pemerintah daerah keluarkan. Perkembangan untuk rasio Indeks Kemampuan Rutin (IKR) berdasarkan analisis trend pada Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2017-2028 menunjukkan trend yang negatif.

5. PENUTUP

Berdasarkan pusat penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 berada pada kategori cukup. Hal ini terlihat dari tren menuju peningkatan yang lebih baik. Jika dilihat dari segi rasio, maka rasio Etcivity termasuk dalam kategori sangat ekonomis, sedangkan rasio efisiensi termasuk dalam kategori sangat ekonomis. Namun jika dilihat dari indeks kapasitas konvensional termasuk dalam kategori sangat buruk. Analisis tren indeks efisiensi dan kapasitas rutin (IKR) provinsi Sumatera Selatan periode 2017-2028 menunjukkan perkembangan peluang. Sementara itu, analisis perkembangan rasio efisiensi PAD provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017-2028 menunjukkan tren yang terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan temuan di atas, disarankan agar pemerintah daerah Sumatera Selatan meningkatkan sumber daya keuangannya, guna memaksimalkan pendapatan yang telah diberikan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah karena keduanya merupakan sumber pendapatan utama pemerintah kota. Dan pemerintah daerah juga perlu melakukan pengawasan dan pengawasan terhadap pegawai daerah untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada saat pemungutan pajak dan retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bulo, Y. (2019). Analisis Rasio Keuangan Pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah Daerah Kota Bontang. *FEB UNMUL*.
- Christian, B., Walewangko, E. N., & D.Tolosang, K. (2023). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan*. 23(2), 61–72.
- Damanhuri, Z. P. (2013). Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2007-2011. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=189040&val=6467&title=ANALISA KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007-2011>
- Maulia, S. (2022). *Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pengelolaan APBD Tahun 2020 Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Langsa Provinsi Aceh*.
- Oesi Agustina. (2013). *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian di Era Otonomi Daerah*. Brawijaya Malang.
- Panggabean, P. (2017). Analisis Sumber-Sumber Dan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Untuk Mensejahterakan Daerah Di Kabupaten Dairi. *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 3(1), 197056.
- Pratama Ahmad et.al. (2016). Konektivitas Transportasi Laut terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Maritim Asia Tenggara. *Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1–11.
- Puspita, N. D. (2016). *Indeks Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan*. 1–23.
- Tamboto, L., Morasa, J., & Mawikere, L. (2014). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Pada Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Emba*, 2(2), 759.
- Tumija, & Sinta, G. (2022). Analisis rasio keuangan daerah dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten cilacap. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 9(2), 61–78. www.djpk.kemenkeu.go.id